

Peran Batalyon Infanteri 330/Tri Dharma pada Operasi Misi Perdamaian di Darfur, Sudan Tahun 2017-2018 Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Hermanto Pungky Prabowo

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: hermantoprabowo179@gmail.com

Abstrak

Konflik berkepanjangan di Darfur, Sudan sejak 2003 telah memicu krisis kemanusiaan dan instabilitas regional yang kompleks. Keterlibatan Indonesia melalui pengiriman Yonif 330/Tri Dharma dalam misi United Nations–African Union Mission in Darfur (UNAMID) merefleksikan komitmen terhadap perdamaian dunia dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik di Darfur serta peran Yonif 330/Tri Dharma dalam operasi perdamaian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Kerangka analisis memadukan Teori Perdamaian, Teori Konflik, Teori Strategi, dan Teori Peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Darfur dipicu oleh perebutan sumber daya, ketimpangan sosial, dan intervensi politik, sementara Yonif 330 berperan dalam pengamanan objek vital, perlindungan warga sipil, patroli keamanan, dan CIMIC. Studi ini menegaskan peran Indonesia sebagai peacekeeper nation yang berorientasi pada positive peace dan strategi smart power.

Kata Kunci: Konflik Darfur; UNAMID; Yonif 330/Tri Dharma; Operasi Militer Selain Perang (OMSP); Penjaga Perdamaian Indonesia; Peacekeeper Nation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik di Darfur, Sudan dimulai pada tahun 2003 dan berkembang menjadi konflik bersenjata berkepanjangan dengan intensitas yang fluktuatif hingga setidaknya tahun 2017. Setelah gencatan senjata Oktober 2016, kekerasan kembali meningkat pada April 2017, terutama di wilayah Jebel Marra antara milisi pemerintah dan Sudan Liberation Movement–Abdel Wahid (SLM-AW), serta di Darfur Utara dan Timur yang melibatkan Rapid Support Forces (RSF) melawan SLM-MM dan SLM-TC (Tubiana, 2023). Konflik ini memiliki akar historis panjang yang dapat dibedakan dalam dua tahap: konflik antarsuku berskala terbatas sejak 1950-an hingga 1970-an (Wadi, 2000), serta konflik modern yang lebih kompleks sejak pertengahan 1980-an akibat perebutan sumber daya yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme tradisional (Ibrahim, 2013). Sejak pertengahan 1980-an, konflik Darfur berkembang menjadi perang besar pada 2003 yang menimbulkan krisis kemanusiaan masif, dengan puluhan ribu korban jiwa, kehancuran desa, dan pengungsian besar-besaran (Daly, 2010). Pada 2017, tercatat sekitar 2,1–2,6 juta pengungsi internal (IDPs), dengan gelombang pengungsian baru akibat pertempuran di Darfur Utara dan Jebel Marra (Acjps, 2017; Dabanga, 2017; UN Press). Kondisi pengungsi semakin rentan akibat keterbatasan air, pangan, dan perlindungan, serta ketidakmampuan untuk kembali ke daerah asal karena situasi keamanan yang belum stabil (Radio Dabanga, 2020), meskipun pemerintah Sudan mengklaim adanya perbaikan keamanan dan mendorong pemulangan pengungsi (UNSC, 2017).

Berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah Sudan dan komunitas internasional, namun hasilnya masih terbatas. Pemerintah pusat kerap dituduh

berpihak dan tidak adil dalam menangani konflik (Gaiballa, 2022). Upaya resolusi konflik internasional dimulai melalui African Union Mission in Sudan (AMIS) pada 2004, yang kemudian dinilai tidak efektif karena keterbatasan sumber daya. PBB lalu membentuk UNMIS pada 2005 pasca Comprehensive Peace Agreement (CPA), namun misi ini tidak dapat beroperasi di Darfur akibat penolakan pemerintah Sudan. Kegagalan tersebut melahirkan misi hibrida UNAMID pada 2007 sebagai pendekatan baru PBB dan Uni Afrika dalam menstabilkan Darfur. UNAMID menghadapi tantangan besar dalam menjalankan mandatnya, termasuk ancaman keamanan, keterbatasan logistik, medan gurun Sub-Sahara yang ekstrem, serta keterbatasan transportasi dan infrastruktur (Wardah, 2023). Konflik yang terus berlangsung juga berkaitan erat dengan perebutan objek vital nasional, yang secara geopolitik dipahami sebagai center of gravity atau ruang hidup strategis (Clausewitz, 1984). Di Darfur, objek vital yang relevan dengan mandat UNAMID mencakup markas sektor, pos pengamanan, infrastruktur sipil, dan fasilitas distribusi bantuan kemanusiaan. Kerusakan infrastruktur vital seperti rumah sakit, pembangkit listrik, dan fasilitas air memperparah krisis kemanusiaan dan memperlambat proses rekonstruksi (Assal, 2016).

Indonesia berperan aktif dalam misi UNAMID sebagai bagian dari komitmen terhadap perdamaian dunia, antara lain melalui pengiriman Kontingen Garuda, termasuk Yonif 330/Tri Dharma TNI AD pada periode 2017–2018, sejalan dengan Perpres No. 86 Tahun 2015 dan Resolusi DK PBB 2265 (2016). Yonif 330/Tri Dharma melaksanakan pengamanan objek vital, perlindungan warga sipil, pengawalan kemanusiaan, serta pembinaan teritorial terbatas, meskipun menghadapi kendala bahasa, keterbatasan kendaraan, dan medan operasi yang sulit. Namun, kajian akademik yang secara khusus membahas peran satuan ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis dinamika konflik Darfur dan peran Yonif 330/Tri Dharma dalam mendukung tugas pokok TNI AD pada misi perdamaian UNAMID tahun 2017–2018, baik dari perspektif ilmu pertahanan maupun hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan teori perdamaian, teori konflik, teori strategi, teori peran serta konsep objek vital nasional. Teori Perdamaian memandang perdamaian sebagai kondisi tanpa kekerasan dan perang, yang secara etimologis berasal dari konsep *pax* (keselarasan), berlawanan dengan konflik (*conflictus*) (Meran, 2019). Dalam hubungan internasional, perdamaian dipahami melalui dua arus besar: liberal-idealisme dan realisme. Kaum liberal, terutama Kant, menekankan bahwa perdamaian dapat diwujudkan melalui hukum internasional, demokrasi, dan perdagangan yang menciptakan tatanan normatif di tingkat domestik, internasional, dan kosmopolitan (Attack, 2005; Geuss, 2002). Sebaliknya, realisme yang dipelopori Hobbes melihat perdamaian sebagai kondisi rapuh dalam sistem internasional yang anarkis, di mana stabilitas hanya dapat dicapai melalui dominasi kekuatan atau hegemoni (Hobbes, 2002). Sementara itu, Bertrand Russell berpendapat bahwa perdamaian global hanya mungkin terwujud melalui pemerintahan dunia yang mampu mencegah persaingan antarnegara yang berujung pada perang (Russel, 1992).

Teori Konflik menjelaskan konflik sebagai benturan kepentingan, tujuan, atau persepsi antaraktor dalam kondisi sumber daya yang terbatas (Antonius et al., 2002; Leparatu et al., 2018; Susan, 2009). Konflik merupakan fenomena inheren dalam kehidupan sosial yang dipicu oleh perbedaan identitas, nilai, status, serta ketimpangan distribusi kekayaan dan kekuasaan (Setiadi & Kolip, 2011; Wirawan, 2016). Robbins dan Judge (2016) mengklasifikasikan konflik ke dalam tiga perspektif—tradisional, hubungan kemanusiaan, dan interaksionis—yang memandang konflik dari sesuatu yang harus dihindari hingga dianggap perlu untuk menjaga dinamika sosial. Pemikir seperti Weber dan Marx menegaskan bahwa konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan, terutama dalam masyarakat yang heterogen dan timpang. Teori Strategi memaknai strategi sebagai penggunaan sarana dan

cara, baik militer maupun non-militer, untuk mencapai tujuan politik tertentu (Baylis, 2002). Clausewitz mendefinisikan strategi sebagai penggunaan pertempuran untuk tujuan perang, sementara Gray, Wylie, dan Heuser menekankan hubungan erat antara kebijakan, kekuatan, dan kehendak lawan dalam pencapaian tujuan strategis (Clausewitz, 2007; Gray, 2010; Wylie, 1967; Heuser, 2012). Dalam perspektif realisme struktural, Waltz menyoroti pengaruh struktur internasional yang anarkis terhadap strategi negara, namun menegaskan bahwa variasi kemampuan dan kemauan aktor juga menentukan pilihan strategi (Waltz, 2010). Hansen, Toft, dan Wivel (2009) menambahkan faktor keamanan relatif, jarak ideologis, serta pilihan defensif atau ofensif sebagai variabel penting dalam menjelaskan strategi negara di sistem internasional unipolar.

Teori Peran menjembatani hubungan antara aktor dan struktur dalam sistem internasional dengan memandang negara sebagai pelaku sosial yang menjalankan peran tertentu berdasarkan persepsi internal (ego) dan harapan eksternal (alter) (Holsti, 1970). Peran negara dibentuk melalui *role conception* dan diwujudkan dalam *role performance*, yang dapat berubah seiring dinamika politik, pembelajaran, dan sosialisasi norma internasional. Ketidaksesuaian antara ekspektasi dan performa peran dapat memicu konflik peran, sementara proses adaptasi dan pembelajaran memungkinkan terjadinya perubahan identitas dan orientasi kebijakan luar negeri negara. Dengan demikian, teori peran penting untuk memahami perubahan tatanan internasional yang tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuatan material, tetapi juga oleh interaksi sosial dan normatif. Konsep Objek Vital Nasional berakar pada pemikiran geopolitik yang memandang ruang hidup (*lebensraum*) sebagai sumber utama kepentingan dan konflik negara (Flint, 2006; Bowo, 2016). Agnew menekankan bahwa karakteristik lokasi dan *sense of place* membentuk ruang hidup yang harus dipertahankan, sementara Massey melihat ruang sebagai hasil interaksi produktivitas manusia yang saling memengaruhi (Agnew, 1998; Flint, 2006). Dalam konteks negara modern, objek vital nasional dipahami sebagai fasilitas atau wilayah strategis yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perlindungan objek vital nasional menjadi keharusan strategis untuk mencegah gangguan keamanan dan menjaga stabilitas nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali dan memahami makna, motivasi, serta dinamika fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menyusun gambaran komprehensif mengenai masalah sosial melalui teks, deskripsi rinci, dan interpretasi data yang diperoleh langsung dari lingkungan alamiah penelitian (Creswell, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yang fleksibel namun terarah, seperti wawancara dan penelaahan dokumen, guna menetapkan signifikansi isu dan memahami konteks kebijakan serta praktik di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan menelaah secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan eksplorasi holistik terhadap peristiwa, aktor, dan dinamika yang terjadi dalam batas ruang dan waktu tertentu (Yin, 1994; McMillan & Schumacher, 2006). Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik dengan jumlah informan terbatas, sehingga kedalaman analisis lebih diutamakan dibandingkan keluasan cakupan (Ridwan & Tungka, 2024).

Penelitian dilaksanakan di PMPP TNI dan Yonif 330/Tri Dharma Brigif 17/Kujang Divif 1 Kostrad, dengan waktu pelaksanaan selama kurang lebih delapan bulan pada tahun 2025. Subjek penelitian adalah personel yang pernah tergabung dalam Satgas TNI UNAMID XXXV-D Darfur Sudan TA 2017–2018, yang dipilih berdasarkan posisi dan peran strategisnya dalam

struktur satuan. Informan terdiri dari unsur pimpinan, staf operasional, prajurit wanita, dan anggota Yonif 330/Tri Dharma, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan (Kerlinger, 1978; Sugiyono, 2015). Objek penelitian adalah kebijakan dan praktik pemberdayaan prajurit perempuan dalam misi perdamaian, dengan penekanan pada efektivitas implementasinya. Dalam penelitian kualitatif, data utama bersumber dari kata-kata dan tindakan informan, sedangkan dokumen berfungsi sebagai data pendukung (Moleong, 2012). Penelitian ini berlandaskan paradigma postpositivistik yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, dinamis, dan penuh makna, serta menekankan hubungan interaktif antar gejala sosial (Silitonga, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Wawancara semi terstruktur dipilih karena bersifat fleksibel namun terkontrol, memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam melalui pertanyaan terbuka yang tetap berpedoman pada tema penelitian (Creswell, 2016; Ridwan & Tungka, 2024). Studi dokumen digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data primer melalui penelaahan buku, jurnal, peraturan, kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan (Herdiansyah, 2019). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi, khususnya triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi (Satori, 2009). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan selama proses penelitian (Miles, 2014; Moleong, 2017). Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wilayah Darfur

Darfur merupakan wilayah luas di bagian barat Sudan dengan luas sekitar 493.180 km² dan berbatasan langsung dengan Libya, Chad, serta Republik Afrika Tengah (Flint & De Waal, 2008). Wilayah ini terbagi ke dalam lima negara bagian—Darfur Utara, Tengah, Selatan, Barat, dan Timur—yang mengalami pemekaran administratif sejak awal abad ke-21. Secara geografis, Darfur memiliki karakteristik beragam, mulai dari gurun di bagian utara, sabana di wilayah tengah, hingga pegunungan di selatan, dengan Pegunungan Marrah (Jebel Marra) sebagai fitur paling menonjol yang berperan penting dalam sistem hidrologi dan kehidupan sosial-ekonomi (Collins, 2006). Iklim Darfur berkisar dari gurun hingga semi-kering, dengan curah hujan yang sangat tidak merata, kurang dari 100 mm per tahun di wilayah utara hingga lebih dari 700 mm di sekitar Pegunungan Marrah (UNEP, 2012). Kondisi iklim ini menjadikan air dan lahan subur sebagai sumber daya strategis sekaligus sumber konflik. Ekosistem Darfur mendukung pertanian subsisten dan peternakan, namun degradasi lingkungan, penggurunan, serta perubahan iklim telah memperparah ketahanan pangan dan meningkatkan kerentanan sosial masyarakat (Hassan, 2010). Mayoritas penduduk Darfur tinggal di wilayah pedesaan dan menggantungkan hidup pada pertanian serta penggembalaan. Perbedaan kondisi ekologis antara wilayah utara yang kering dan selatan yang relatif subur menciptakan dinamika persaingan antara komunitas petani dan penggembala, yang menjadi salah satu faktor pemicu konflik berkepanjangan (De Waal, 2007). Konflik bersenjata juga mendorong migrasi paksa dan urbanisasi, dengan jutaan penduduk mengungsi ke kota-kota besar dan kamp pengungsi akibat ketidakamanan yang terus berlangsung.

Darfur memiliki sejumlah objek vital nasional yang bernilai strategis dan berkontribusi langsung terhadap konflik. Pegunungan Marrah berfungsi sebagai pusat sumber air dan kawasan pertanian produktif, namun juga menjadi basis operasi kelompok pemberontak

sehingga sering menjadi target operasi militer (Flint & De Waal, 2008; De Waal, 2007). Tambang emas Jebel Amir di Darfur Utara menjadi sumber pendapatan ekonomi besar sekaligus pemicu konflik bersenjata, perdagangan ilegal, kerusakan lingkungan, dan ketegangan antar kelompok etnis (Human Rights Watch, 2018; Hassan, 2010; UNEP, 2012). Selain itu, Bandara El Fasher berperan sebagai pusat transportasi, logistik militer, dan distribusi bantuan kemanusiaan, namun kerap menjadi target serangan karena nilai strategisnya (Flint & De Waal, 2008; International Crisis Group, 2013). Kamp pengungsi Kalma di Darfur Selatan menjadi simbol krisis kemanusiaan, menampung lebih dari 100.000 pengungsi dalam kondisi yang sangat rentan akibat keterbatasan sumber daya dan ancaman keamanan (Human Rights Watch, 2018). Di sisi lain, waduk dan sumber air utama di Darfur menjadi objek vital yang sering diperebutkan, terutama di tengah perubahan iklim dan kerusakan infrastruktur air akibat konflik, sehingga memperpanjang ketidakstabilan sosial dan keamanan di wilayah tersebut (Collins, 2006; UNEP, 2012).

Kontingen Garuda dalam UNAMID

Kontingen Garuda merupakan pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk dalam misi United Nations–African Union Mission in Darfur (UNAMID) yang dibentuk pada tahun 2007 sebagai respons terhadap konflik kemanusiaan berkepanjangan di Darfur, Sudan. Mandat utama UNAMID meliputi perlindungan warga sipil, fasilitasi bantuan kemanusiaan, dan dukungan terhadap proses perdamaian (United Nations, 2020). Indonesia mulai berpartisipasi sejak 2008 melalui Indonesian Battalion (Indobatt), Formed Police Unit (FPU), dan Military Observers (MilObs), dengan kontribusi yang mencakup tugas keamanan sekaligus kegiatan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat (TNI AD, 2015). Sebagai bagian dari Kontingen Garuda, Yonif 330/Tri Dharma TNI AD menjalankan peran kunci dalam pengamanan wilayah operasi UNAMID, khususnya di sektor barat Darfur. Berdasarkan Protap UNAMID XXXV-D, satuan ini bertugas melaksanakan patroli rutin, menjaga Super Camp dan Observation Post (OP), mengamankan jalur logistik, serta berperan sebagai Quick Reaction Force (QRF) dalam merespons insiden keamanan. Pengamanan 14 OP di sekitar El Geneina menuntut kesiapsiagaan operasional 24 jam, disiplin pelaporan, serta pengambilan keputusan cepat dalam menghadapi potensi ancaman dari kelompok bersenjata lokal.

Selain fungsi pengamanan, Yonif 330/Tri Dharma juga melaksanakan tugas convoy escort untuk menjamin kelancaran distribusi logistik UNAMID di jalur-jalur rawan. Tugas ini memiliki tingkat risiko tinggi karena kondisi geografis Darfur yang ekstrem dan ancaman penyergapan, sehingga menuntut kesiapan taktis, koordinasi komunikasi yang intensif, serta mitigasi ancaman secara aktif. Dalam konteks ini, peran Yonif 330 tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlangsungan operasi misi PBB di Darfur. Peran Yonif 330/Tri Dharma bersifat multidimensi, mencakup aspek diplomasi militer dan hubungan sipil–militer (CIMIC). Personel diwajibkan menjaga etika, menghormati budaya lokal, serta berperan sebagai representasi negara dalam interaksi dengan masyarakat Darfur dan pejabat internasional. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan civic mission memperkuat kepercayaan masyarakat lokal serta meningkatkan citra Indonesia di tingkat global (UN Peacekeeping, 2019). Pendekatan ini mencerminkan penerapan smart power, yaitu perpaduan antara kekuatan militer terbatas dan pendekatan sosial berbasis perdamaian.

Dalam aspek sumber daya manusia, personel Yonif 330/Tri Dharma diseleksi melalui mekanisme person–job fit yang menekankan kesiapan fisik, mental, dan teknis sesuai tuntutan medan operasi (Hasibuan, 2003). Persyaratan meliputi standar jasmani, kemampuan bahasa Inggris (IELTS minimal 5), keterampilan komputer, kemampuan mengemudi, serta tes

kesehatan dan psikologi (Rivai, 2004; Mangkunegara, 2002; Sedarmayanti, 2001). Seluruh personel mengikuti pelatihan prapenugasan di PMPP TNI selama satu bulan, yang mencakup pembekalan teknis, aturan pelibatan, hukum humaniter internasional, bahasa asing, serta pengenalan budaya dan medan Darfur (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Meskipun menunjukkan keunggulan dalam disiplin, mobilitas, dan ketahanan fisik, Yonif 330/Tri Dharma masih menghadapi keterbatasan struktural dan kompetensial. Kesenjangan antara tuntutan medan dan kapasitas teknis personel, keterbatasan kemampuan bahasa dan pemahaman budaya lokal, serta sistem logistik yang masih manual menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran satuan. Akibatnya, peran Yonif 330 lebih dominan sebagai pelaksana taktis dibandingkan aktor strategis dalam misi internasional. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas rekrutmen, pelatihan berbasis kompetensi lapangan, serta modernisasi sistem pendukung agar kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian PBB dapat mencapai potensi maksimal.

Faktor Konflik di Darfur, Sudan

Konflik Darfur berakar pada marginalisasi struktural dan ketimpangan politik yang bermula sejak masa kolonial dan berlanjut pascakemerdekaan Sudan tahun 1956. Darfur, yang sebelumnya merupakan kesultanan independen di bawah Dinasti Keira, kehilangan otonomi politik dan akses pembangunan setelah terintegrasi ke dalam negara Sudan. Pemerintah pusat di Khartoum yang didominasi elite Arab-Muslim secara sistematis mengeksklusi Darfur dari representasi politik dan distribusi sumber daya, menciptakan rasa ketidakadilan kolektif di kalangan masyarakat lokal (De Waal, 2022). Dalam perspektif teori konflik, ketimpangan struktural ini membentuk relasi status quo versus status need yang menjadi benih konflik berkepanjangan (Setiadi & Kolip, 2011). Faktor ekonomi dan sumber daya turut memperdalam konflik. Darfur memiliki kekayaan alam seperti lahan subur dan emas (Jebel Amir), tetapi manfaatnya tidak dinikmati masyarakat lokal karena eksploitasi terpusat oleh elite politik dan militer di Khartoum (Karamalla-Gaiballa, 2022). Krisis ekologis berupa kekeringan dan desertifikasi sejak 1970-an memperparah perebutan lahan dan air antara petani menetap dan penggembala nomaden, mengubah konflik agraria menjadi benturan etnis (Leparatu et al., 2018; Wibowo, 2013). Dengan demikian, ekonomi menjadi basis material konflik, sementara identitas etnis berfungsi sebagai medium simbolik untuk klaim sumber daya.

Dimensi sosial dan etnokultural konflik Darfur ditandai oleh polarisasi identitas “Arab” dan “Afrika” yang diperkuat oleh ideologi Arabisasi negara. Meskipun mayoritas masyarakat Darfur beragama Islam, identitas etnis dimanipulasi pemerintah sebagai alat legitimasi kekuasaan dan delegitimasi tuntutan kesetaraan politik kelompok non-Arab (Smiles, 2008). Dalam kerangka Weberian, dominasi ideologis ini digunakan untuk mempertahankan hegemoni sosial, sehingga konflik identitas berkembang menjadi konflik politik eksistensial tentang siapa yang dianggap sebagai bagian sah dari negara Sudan. Militerisasi konflik sejak 2003 menjadi titik eskalasi utama. Kemunculan SLM/A dan JEM sebagai respons terhadap eksklusi politik ditanggapi pemerintah Omar al-Bashir dengan kekerasan sistematis melalui milisi Janjaweed, yang melakukan pembantaian, pemerkosaan massal, dan pembakaran desa (Nauvally, 2025). Dalam teori Pruitt & Rubin, konflik menjadi destruktif ketika aktor meyakini tujuan mereka tidak dapat dicapai bersama, sehingga kekerasan dipandang sebagai satu-satunya instrumen kekuasaan (Susan, 2009). Kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi senjata perang yang menghancurkan kohesi sosial dan memperpanjang trauma lintas generasi (Soekanto; Nauvally, 2025). Konflik Darfur juga dipengaruhi oleh faktor internasional dan krisis legitimasi negara. Keterlibatan aktor eksternal seperti Chad, Libya, serta kepentingan global AS, Rusia, dan Tiongkok memperluas konflik menjadi arena proksi geopolitik

(Karamalla-Gaiballa, 2023). Intervensi PBB dan ICC—termasuk dakwaan terhadap Omar al-Bashir—memunculkan dilema antara keadilan internasional dan kedaulatan nasional, yang justru memicu resistensi domestik (De Waal, 2022). Pada akhirnya, konflik Darfur mencerminkan kegagalan negara Sudan dalam mendistribusikan keadilan dan mengelola pluralitas, sehingga runtuhnya kepercayaan sosial dan legitimasi negara mendorong kekerasan sebagai sarana utama.

Peran Yonif 330 dalam Operasi Perdamaian di Darfur, Sudan

Yonif 330/Tri Dharma TNI AD memiliki peran penting dalam mendukung operasi perdamaian di Darfur, khususnya melalui pengamanan wilayah dan dukungan logistik kendaraan operasional. Dalam kondisi geografis Darfur yang luas, bergurun, dan minim infrastruktur, kendaraan angkut personel menjadi elemen vital bagi mobilitas pasukan, patroli rutin, distribusi bantuan kemanusiaan, serta rotasi personel antarpos. Oleh karena itu, kesiapan kendaraan dan keberlangsungan suku cadang dipandang sebagai prasyarat utama kelancaran mandat misi PBB. Dalam pelaksanaannya, Yonif 330 tidak hanya bertindak sebagai pengguna kendaraan, tetapi juga sebagai pengelola logistik tingkat satuan. Personel bertanggung jawab memastikan rantai pasok internal berjalan efektif, mulai dari penyimpanan, distribusi suku cadang, hingga perawatan teknis di lapangan. Keterlambatan satu komponen kendaraan dapat berdampak langsung pada tertundanya patroli, pengamanan konvoi, maupun respon cepat terhadap insiden keamanan. Oleh karena itu, profesionalisme logistik menjadi bagian tak terpisahkan dari peran operasional Yonif 330 di Darfur. Distribusi logistik Yonif 330/Tri Dharma dipusatkan di El Geneina, ibu kota Darfur Barat yang berfungsi sebagai simpul logistik strategis UNAMID karena kedekatannya dengan perbatasan Chad. Kota ini digunakan sebagai *staging area* untuk penyimpanan sementara bahan makanan, air minum, bahan bakar, serta perlengkapan teknik dan medis sebelum disalurkan ke sektor-sektor lain. Setiap pengiriman memerlukan perencanaan rute yang detail karena jalur distribusi kerap melintasi wilayah rawan konflik dan medan yang sulit.

Untuk mengurangi risiko pembajakan dan gangguan keamanan, Yonif 330 menerapkan strategi pengiriman logistik secara terencana dan bertahap, disertai pengamanan konvoi bersenjata. Selain jalur darat, satuan ini juga memanfaatkan dukungan udara menggunakan pesawat kecil guna mempercepat mobilisasi personel dan perlengkapan vital ke wilayah terpencil. Pendekatan ini mencerminkan penerapan *multi-modal logistic support* yang adaptif terhadap kondisi geografis dan ancaman lokal. Di luar aspek logistik, Yonif 330/Tri Dharma menjalankan peran keamanan dan kesiapsiagaan operasional, meliputi patroli rutin setiap dua jam, penjagaan Super Camp dan 14 Observation Post, serta kesiapan sebagai Quick Reaction Force (QRF). Fungsi ini menempatkan Yonif 330 sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas sektor barat Darfur dan melindungi objek vital UNAMID, termasuk jalur bantuan kemanusiaan dan infrastruktur pendukung misi. Yonif 330 juga menjalankan fungsi hubungan sipil–militer (CIMIC) dan diplomasi militer sebagai representasi negara Indonesia. Personel dituntut menjaga etika, menghormati budaya lokal, serta membangun interaksi positif dengan masyarakat Darfur yang hidup dalam dinamika konflik etnis dan persaingan sumber daya. Namun, keterbatasan penguasaan bahasa Inggris, minimnya pemahaman budaya lokal, serta kurangnya pelibatan masyarakat Sudan dalam pelatihan prapenugasan menjadi kendala dalam membangun hubungan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, peran Yonif 330/Tri Dharma dalam misi perdamaian di Darfur tergolong signifikan pada level taktis dan fungsional, khususnya dalam pengamanan wilayah dan dukungan logistik. Namun, peran tersebut belum berkembang optimal ke tingkat strategis. Kesenjangan antara tuntutan medan dengan kapasitas personel, durasi pre-deployment training (PDT) yang relatif singkat, serta

keterbatasan keahlian teknis dan lintas budaya membatasi kemampuan satuan untuk bertindak lebih proaktif dan inovatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan rekrutmen berbasis kompetensi, pendalaman pelatihan prapenugasan, serta modernisasi sistem logistik agar Yonif 330/Tri Dharma mampu berkontribusi lebih maksimal dalam misi perdamaian internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik di Darfur merupakan konflik struktural yang kompleks dan multidimensional, dipicu oleh ketimpangan kekuasaan, perebutan sumber daya akibat degradasi lingkungan, serta lemahnya tata kelola negara. Dalam perspektif Teori Konflik (Marx, Weber, Pruitt & Rubin), konflik ini berkembang dari ketegangan sosial menjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup melalui penghentian kekerasan (*negative peace*), melainkan memerlukan pembangunan *positive peace* yang menekankan rekonsiliasi, keadilan sosial, dan pemulihan masyarakat sipil. Kehadiran UNAMID mencerminkan pendekatan keamanan kolektif, sementara partisipasi Indonesia melalui Yonif 330/Tri Dharma menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian dunia. Peran Yonif 330/Tri Dharma dalam UNAMID merefleksikan penerapan Teori Peran, di mana Indonesia menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian sesuai dengan ekspektasi internasional. Melalui pengamanan wilayah, perlindungan warga sipil, patroli keamanan, dan kegiatan CIMIC, satuan ini menunjukkan kesesuaian antara konsepsi peran nasional dan harapan komunitas global. Dari sudut pandang Teori Strategi, operasi Yonif 330 mengintegrasikan kekuatan militer terbatas dengan pendekatan non-militer, mencerminkan penerapan *smart power* untuk menjaga stabilitas di wilayah konflik. Selain itu, pengamanan fasilitas UNAMID, jalur bantuan kemanusiaan, dan infrastruktur sipil menunjukkan relevansi Konsep Objek Vital Nasional dalam konteks geopolitik dan *center of gravity* operasi perdamaian. Meski demikian, efektivitas misi masih dihadapkan pada kendala utama berupa keterbatasan kemampuan bahasa dan sarana kendaraan operasional, yang memengaruhi mobilitas dan respons pasukan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Yonif 330/Tri Dharma tidak hanya berperan sebagai instrumen keamanan, tetapi juga sebagai aktor sosial dan diplomatik, yang merepresentasikan strategi pertahanan Indonesia berbasis operasi militer selain perang (OMSP) dan orientasi pada perdamaian aktif.

Secara teoretis, penelitian ini menyarankan pengembangan kajian misi perdamaian melalui pendekatan multidisipliner. Teori Peran perlu diperdalam untuk menjelaskan pembentukan identitas Indonesia sebagai *peacekeeper nation*, dengan memasukkan dimensi budaya dan ideologi pertahanan yang bersumber dari doktrin TNI dan politik luar negeri bebas aktif. Selain itu, Teori Strategi perlu diperluas penerapannya dari konteks perang konvensional ke operasi militer selain perang (OMSP), khususnya dalam merumuskan strategi hibrida yang mengintegrasikan *hard power* dan *soft power* dalam lingkungan multilateral PBB. Teori Konflik dan Teori Perdamaian juga perlu dikontekstualisasikan ulang untuk menjelaskan transformasi konflik dari *negative peace* menuju *positive peace*, dengan menempatkan pasukan perdamaian sebagai aktor aktif dalam proses rekonsiliasi. Temuan ini menegaskan pentingnya *integrated theory* antara strategi militer dan teori sosial guna memahami dimensi kemanusiaan operasi perdamaian. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pre-deployment training prajurit TNI agar lebih siap menghadapi tantangan taktis, sosial, dan kultural di daerah misi. Pelatihan perlu mencakup penguasaan bahasa asing, diplomasi lapangan, serta manajemen krisis sipil. Penguatan sistem logistik dan dukungan peralatan juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat keterbatasan transportasi dan medan ekstrem di wilayah operasi seperti Darfur. Pengalaman Yonif 330/Tri Dharma dalam pengamanan objek

vital dan pelaksanaan CIMIC dapat dijadikan model bagi satuan lain, dengan menempatkan pendekatan humanis sebagai bagian integral doktrin operasi perdamaian TNI. Selain itu, diperlukan mekanisme post-deployment review yang terstruktur untuk mendokumentasikan *lesson learned* setiap penugasan, sehingga dapat dirumuskan SOP yang lebih adaptif terhadap dinamika konflik dan medan tugas. Penguatan kerja sama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga akademik juga penting untuk memperkuat basis riset strategis kebijakan pertahanan luar negeri Indonesia. Secara khusus, kendala bahasa dan keterbatasan kendaraan perlu diatasi melalui pelatihan bahasa Arab Sudan yang lebih aplikatif serta sistem pemeliharaan dan dukungan logistik kendaraan yang bersifat preventif dan terintegrasi. Dengan penguatan aspek sumber daya manusia dan logistik tersebut, efektivitas dan kesiapsiagaan pasukan perdamaian Indonesia dalam melaksanakan mandat perlindungan sipil di bawah PBB diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, R., dkk. (2002). *Sosiologi: Sebuah Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Assal, M. A. (2016). *Civil society and peace building in Sudan: A critical look*. Diambil kembali dari Chr. Michelsen Institute (CMI): <https://www.cmi.no/publications/5807-civil-society-and-peace-building-in-sudan>
- Atack, I. (2005). *The ethics of peace and war*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Peningkatan kompetensi bahasa asing strategis (PKBAS) bagi personel Tentara Nasional Indonesia*. Diambil kembali dari <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/berita-detail/1930/peningkatan-kompetensi-bahasa-asing-strategis-pkbas-bagi-personel-tentara-nasional-indonesia>
- Baylis, J. (2002). *Strategy in the contemporary world: An introduction to strategic studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Britannica. (2024). *Darfur Region, Sudan*. . Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Darfur>
- Brosché, J., & Rothbart, D. (2013). *Violent conflict and peacebuilding: The continuing crisis in Darfur*. London: Routledge.
- Clausewitz, C. v. (1984). *On war*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Daly, M. (2010). *Darfur's sorrow: The forgotten history of a humanitarian disaster*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collins, R. O. (2006). *A History of Modern Sudan*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daly, M. (2010). *Darfur's Sorrow: The Forgotten History of a Humanitarian Disaster*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Darajat, I. T., & Sudiarto, T. D. (2023). Participation of FPU (Formed Police Unit) 8 Indonesia on UNAMID in Darfur, Sudan period 2016–2018. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 1(4), 1–10.
- De Waal, A. (2007). *War in Darfur and the Search for Peace*. Cambridge: Harvard University Press.
- Deda, K. L., & Saragih, H. M. (2024). Indonesia diplomatic efforts in the conflict in Darfur Sudan. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(1), 123–130.
- Flint, J., & De Waal, A. (2008). *Darfur: A new history of a long war*. London: Zed Books.
- Geuss, R. (2002). *Liberalism and its discontents*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gaiballa, N. K. (2022). The armed conflict in Darfur: Analysis of the motives and objectives of the rebel groups. *African Journal of Economics, Politics and Social Studies*, 1(1), 1–15.

- Geuss, R. (2002). Liberalism and its Discontents. *Political Theory*, 30(3).
- GlobalSecurity.org. (2024). *Darfur: Geography and Climate*. Diambil kembali dari GlobalSecurity: <https://www.globalsecurity.org/military/world/sudan/darfur-geography.htm>
- Hansen, B., Toft, P., & Wivel, A. (2009). *Security strategies and American world order*. New York: Routledge.
- Heuser, B. (2012). *The evolution of strategy: Thinking war from antiquity to the present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hassan, Y. (2010). *Natural Resources and Conflict in Sudan*. Nairobi: African Centre for Technology Studies.
- Heuser, B. (2012). *The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobbes, T. (2002). *Leviathan*. New York: Simon & Schuster.
- Human Rights Watch. (2018). *Crisis in Kalma Camp, South Darfur*. Human Rights Watch: New York.
- Ibrahim, I. M. (2013). The traditional mechanisms of conflict resolution and peace building in Darfur: From an anthropological perspective. *Mediterranean Journal of Social Science*, 4(9), 33-45.
- International Crisis Group. (2013). *Gold and Conflict in Sudan*. Brussels: International Crisis Group.
- Jurdi, S. (2013). *Sosiologi Nusantara: Memahami sosiologi integralistik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Jurnal Strategi Militer. (2021). Evaluasi pasca-penugasan personel TNI di Sudan: Tantangan operasional dan kompetensi teknis. *Jurnal Strategi Militer*, 17(2), 55-70.
- Koops, J. A., & Tull, D. M. (2015). UN peacekeeping missions and host nation dynamics. *Journal of International Peace Operations*, 11(3), 45-56.
- Leparatu, F. I., Kusworo, & Thahir, I. (2018). Strategy for conflict completing of the confirmation of regional borders between Niacoten II village and administrative village Kuanino in East Nusa Tenggara province. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 10(2), 78-89.
- Leparatu, M., Kusworo, A., & Thahir, M. (2018). *Teori Konflik dan Resolusi Sosial*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Mahmoud, Y. (2011). Local conflicts in Darfur: Community perspectives. *Sudan Working Paper Series*, 3(2), 1-20.
- Meran, M. (2019). Perdamaian dalam perspektif Katolik dan Islam. *Jurnal Jumpa*, 7(2), 73-91.
- Meran, M. (2019). Perdamaian Dalam Prspektif Katolik dan Islam. *Jurnal Jumpa*, 7(2), 73 - 91.
- Mill, D. V. (2002). Civil liberty in Hobbes's Commonwealth. *Australian Journal of Political Science*, 37(1), 19-33.
- Nauvally, Z. S. (2025). *Analisis Konflik Bersenjata di Darfur: Dinamika Politik dan Kemanusiaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nindya, K. S. (2018). *Kepentingan negara dalam peacekeeping operations PBB di Darfur tahun 2008-2017* [Skripsi, Universitas Indonesia]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- PMPP TNI. (2022). *Modul pelatihan PDT dan evaluasi misi luar negeri*. Jakarta: Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI.
- Pruit, D. G., & Rubin, J. Z. (1986). *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*. New York: Random House.

- Radio Dabanga. (2020). *7 protocols signed in Juba*. Diambil kembali dari <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-peace-talks-7-protocols-signed-in-juba>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Pengiriman Pasukan Perdamaian Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59.
- Rianto, A., Purwanti, E., Bangun, B. H., Erwin, & Kinanti, F. M. (2024). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Sudan Selatan. *Jurnal Hukum dan Revolusi (HOLREV)*, 5(1), 1–14.
- Ridwan, & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Organizational Behavior* (17th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Russel, B. (1992). *Dampak ilmu pengetahuan atas masyarakat* (Irwanto & R. H. Imam, Trans.). Jakarta: Gramedia.
- Sarjito, A. (2022). *Logistik Pertahanan*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.
- Satria, D. (2019). *Kepentingan Indonesia melalui FPU 11 Indonesia pada konflik Darfur, Sudan* [Tesis, Universitas Budi Luhur]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, aplikasi, dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Silitonga, T. B. (2020). *Perancangan dan penulisan karya ilmiah: Proposal penelitian, skripsi, tesis dan disertasi*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Smiles, J. (2008). "Darfur and the International Community: Failure to Protect." *Contemporary Review*, 289(1685), 33–45.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliman, M. (1999). The political ecology of the Darfur conflict. *ISS Paper*, 83, 1–25.
- Susan, N. (2009). *Pengantar sosiologi konflik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- TNI AD. (2015). *Pasukan Garuda di UNAMID Tunjukkan Profesionalisme TNI di Kancah Internasional*. Diambil kembali dari TNI AD: <https://tniad.mil.id>
- Tubiana, J. (2023, Juni 30). *Darfur: Between two wars – 20 years of conflict in Sudan’s Darfur*. Al Jazeera. Diambil kembali dari <https://www.aljazeera.com/features/longform/2023/6/30/between-two-wars-20-years-of-conflict-in-sudans-darfur>
- UN Peacekeeping. (2019). *Indonesian Peacekeepers Make a Difference in Darfur*. Diambil kembali dari UN Peacekeeping: <https://peacekeeping.un.org>
- UNAMID. (Darfur Peacekeeping and Logistics Report). 2020. United Nations-African Union Mission in Darfur: Khartoum.
- UNEP. (2012). *Sudan Post-Conflict Environmental Assessment*. United Nations Environment Programme.
- United Nations Security Council. (2016). *Resolution 2265 (2016) Adopted by the Security Council at its 7619th meeting*.
- United Nations. (2009). *Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General*. Geneva: United Nations Publications.
- Wadi, E. I. (2000). Ethnic conflict in Sudan: The case of the Darfur region. *Journal of Cultural Studies*, 2(1), 1–12.

- Waltz, K. (2010). *Theory of international politics*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Wardah, F. (2023, April 20). *Pemerintah Indonesia rencanakan evakuasi WNI dari Sudan*. VOA Indonesia. Diambil kembali dari <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-indonesia-rencanakan-evakuasi-wni-dari-sudan/7058538.html>
- Wibowo, S. M. (2013). *Perilaku dalam organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wirawan. (2016). *Konflik dan manajemen konflik (Teori, aplikasi, dan penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widjajanto, A., Sabana, D. R., Lestari, I., Prihandoko, R., & Noor, R. (2023). *Indonesia X Geo V*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- WMO (World Meteorological Organization). (2021). *Sudan country climate profile*. Jenewa: WMO. Diambil kembali dari <https://public.wmo.int>